

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan warga negara yang memiliki gangguan emosional, mental, kelainan fisik, intelektual dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Demikian pula dengan warga negara di daerah terpencil atau pedalaman dan terbelakang serta masyarakat adat pelosok berhak memperoleh layanan pendidikan khusus. Sudah sewajarnya apabila pendidikan menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan secara merata dan bermutu serta ketersediaan dana pendidikan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya kenaikan alokasi dana pendidikan tersebut, diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. Dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan perencanaan yang diterapkan melalui program-program kependidikan.

Program perencanaan pendidikan nasional merupakan salah satu bagian penting dalam proses mewujudkan rencana strategis pembangunan pendidikan

nasional, yaitu pembangunan satuan pendidikan (penyediaan sarana dan prasarana), penyediaan dan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), penyediaan subsidi pendanaan, penyempurnaan sistem pembelajaran, penguatan/peningkatan manajemen dan peningkatan mutu, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebudayaan, kebahasaan, dan kesastraan (Renstra Kemdikbud, 2010: 47). Untuk membangun program perencanaan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dibutuhkan data-data pendukung yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru (*up to date*).

Berdasar pada kebutuhan tersebut, pada tahun 2006 Biro Perencanaan Kerja sama Luar Negeri (PKLN) Depdiknas mulai menganalisa hambatan program perencanaan pendidikan di lingkungan Depdiknas, yaitu belum adanya data referensi yang terpusat, banyaknya pulau data antara satu dan yang lain yang belum terhubung, dan metode pengumpulan data yang masih manual, sehingga perlu adanya pemutakhiran metode pengumpulan data dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh sebab itu, dibangun pusat referensi sistem pendataan terbaru berskala nasional yang mencakup sekolah, peserta didik, dan PTK. Dimana proses pengelolaan datanya mengacu pada sistem perbankan, yaitu dilakukan secara terpusat, daring (*online*), dan dalam waktu nyata (*real time*) yang disebut dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Operator sekolah memiliki tugas yang sangat vital dalam sistem Dapodik. Adapun tugas operator sekolah adalah menyebarkan formulir pendataan Kepala Sekolah, PTK, dan peserta didik dalam rangka mendapatkan data untuk dientri kedalam aplikasi, mengentri data sesuai dengan data yang terisi di formulir

pendataan, dan mengirim data ke server melalui aplikasi dapodik (Kemdikbud, 2015: 4). Namun dalam perjalanannya, tugas operator sekolah menjadi semakin kompleks dengan adanya penggunaan data dapodik sebagai pedoman berbagai tunjangan guru, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bahkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga sering menjadi pusat informasi bagi Kepala Sekolah, guru maupun peserta didik mengenai keakuratan dapodik. Oleh sebab itu, operator harus memiliki kemampuan mengoperasikan TIK agar proses pelaporan dapodik dapat berjalan dengan lancar.

Kesejahteraan operator sekolah juga merupakan permasalahan yang masih perlu diselesaikan karena tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Kebijakan kesejahteraan operator sekolah diserahkan kepada masing-masing sekolah, sehingga banyak operator sekolah yang mengeluh mengeluarkan dana ekstra dan di luar jam kerja untuk mengurus pendataan dapodik. Selain itu, sebagian besar operator sekolah adalah guru Wiyata Bhakti yang sebenarnya bukan tupoksinya dalam pendataan dapodik, sehingga dalam proses pelaporannya harus benar-benar dikawal dan diawasi oleh seorang penanggung jawab yaitu Kepala Sekolah.

Kebenaran dan keakuratan data dapodik menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Kepala Sekolah selaku manajer di sekolah. Dalam hal ini, peran Kepala Sekolah sebagai manajer adalah membimbing, mengarahkan, menggerakkan, dan mengadakan supervisi/monitoring terhadap kinerja operator

sekolah dalam rangka mewujudkan kualitas data dapodik yang akurat, valid, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian karena terjadi kesenjangan antara harapan pemerintah dalam pendataan dapodik dengan realita kondisi kinerja operator sekolah di lapangan. Untuk itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana Kontribusi Motivasi Kerja Operator Sekolah, Kompetensi Operator Sekolah, dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Operator Sekolah Dasar di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, ada tiga permasalahan yang teridentifikasi.

1. Kurangnya motivasi kerja operator sekolah dalam melaksanakan tugasnya karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai masa depan operator sekolah.
2. Rendahnya kompetensi yang dimiliki operator sekolah dalam pengoperasian TIK, sehingga data dapodik menjadi kurang akurat.
3. Manajemen pendidikan sekolah masih kurang efektif dan efisien karena Kepala Sekolah kurang mampu menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya.

C. Pembatasan Masalah

Ada tiga masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

1. Motivasi kerja yang dimaksud adalah mengenai dorongan dari luar diri (*ekstrinsik*) operator sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dapodik.
2. Kompetensi dibatasi pada aspek kemampuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki operator sekolah dalam pengelolaan dapodik.
3. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang dimaksud adalah karakteristik kepemimpinan Kepala Sekolah di sebagai penanggung jawab dapodik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, ada empat hal yang dicari jawabannya.

1. Adakah kontribusi motivasi kerja operator sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten?
2. Adakah kontribusi kompetensi operator sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten?
3. Adakah kontribusi kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten?
4. Adakah kontribusi motivasi kerja operator sekolah, kompetensi operator sekolah, dan kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten?

E. Tujuan Penelitian

Ada empat tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi motivasi kerja operator sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi kompetensi operator sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten.
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten.
4. Mengetahui seberapa besar kontribusi motivasi kerja operator sekolah, kompetensi operator sekolah, dan kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja operator sekolah di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang kontribusi motivasi kerja operator sekolah, kompetensi operator sekolah, dan kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja operator sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi operator sekolah:** Sebagai bahan masukan dalam proses pelaporan dapodik agar dapat melaporkan pendataan dapodik secara cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru (*up to date*).
- b. **Bagi guru:** Sebagai bahan evaluasi diri bahwa kinerja dalam pelaporan dapodik tidak hanya tugas operator sekolah melainkan harus didukung peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. **Bagi Kepala Sekolah:** Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menghadapi hambatan/permasalahan yang timbul dalam pelaporan dapodik karena Kepala Sekolah sangat berpengaruh dalam pelaporan dapodik yang dilaporkan oleh operator sekolah.